



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI HARYONO SUHUD
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 157898

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.049.690.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 784.980.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 94.560.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 588 m2/30 m2 di KAB / KOTA PACITAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 170.150.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **280.200.000**

1. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA MTB Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV E CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPADA OLAH RAGA (BEKAS) Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
6. LAINNYA, JAVA SEPEDA OLAH RAGA (BEKAS) Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



7. LAINNYA, FAMILY SEPEDA ANAK BALITA Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 700.000

8. MOTOR, YAMAHA R15M Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 609.620.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 621.097.485

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.592.407.485

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.592.407.485

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.